

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang bersifat mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Dengan adanya globalisasi pada saat ini, negara-negara di dunia salah satunya negara Indonesia sedang berada di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, arus globalisasi tersebut memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap semua bidang kehidupan seperti bidang teknologi, ekonomi, sosial budaya, politik, ideologi, dan pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan kompleks dalam membantu pelaksanaan kegiatan dalam setiap bidang kehidupan contohnya dalam bidang sosial budaya yang memberikan dampak yang cukup besar terhadap masyarakat Indonesia yaitu seperti telepon genggam, komputer dan aplikasi media sosial yang pada saat ini sangat membantu masyarakat dalam bersosialisasi dengan orang lain baik itu sesama warga negara atau berbeda warga negara dan juga masyarakat dapat mengetahui bagaimana kehidupan budaya di negara lain.

Namun, globalisasi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh masih adanya sifat dan kemampuan masyarakat Indonesia yang masih belum bisa menyikapi dan menyaring dampak negatif globalisasi dengan baik. Salah satunya, dampak negatif globalisasi yang paling utama harus ditanggulangi yaitu terjadinya penurunan kualitas moral dan karakter bangsa terutama dikalangan pelajar/siswa sekolah. Penurunan kualitas moral dan karakter di kalangan pelajar/siswa sekolah dapat dilihat dari banyaknya

bermunculan kasus-kasus perilaku menyimpang salah satunya seperti kenakalan remaja.

Menurut Kartini Kartono, kenakalan remaja diartikan sebagai perlakuan jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat¹. Dalam kasus ini terdapat beberapa pendapat mengenai remaja, menurut Depkes RI Tahun 2009, remaja yaitu mereka yang berusia 12-25 Tahun, sedangkan ada juga menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) remaja yaitu mereka yang digolongkan dalam usia 10-24 Tahun dan masih berstatus belum menikah². Jadi disimpulkan bahwa kenakalan remaja ini adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang berumur rata-rata 10-25 Tahun.

Kasus kenakalan remaja ini setiap Tahun semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan data kenakalan remaja di Indonesia dari Tahun ke Tahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh Asep Saepurokhman dan Yena Sumayana menjelaskan pada Tahun 2013 angka kenakalan remaja di Indonesia mencapai 6325 kasus, sedangkan pada Tahun 2014 jumlahnya mencapai 7007 kasus dan pada Tahun 2015 mencapai 7762 kasus. Artinya dari Tahun 2013 – 2014 mengalami kenaikan sebesar 10,7%,

¹Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2; Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 6

²Delia Yusfarani, Pengetahuan dan Sikap Mahasiswi Program Studi Pendidikan slam Anak Usia Dini (PAUD) Tentang Kesehatan Reproduksi, *Jurnal 'Aisyiyah Medika*, Vol 5, No 1, Februari 2020, hlm 22

kasus tersebut terdiri dari berbagai kasus kenakalan remaja diantaranya seperti pencurian, pembunuhan, pergaulan bebas dan narkoba. Dari data BPS tersebut, diprediksi kenaikan tiap Tahunnya dari 2016-2020 yakni sebesar 10.7%. Sehingga, 2016 bisa mencapai 8597,97 kasus, 2017 mencapai 9523.97 kasus, 2018 sebanyak 10549,70 kasus, 2019 mencapai 11685,90 kasus dan pada Tahun 2020 mencapai 12944,47 kasus³.

Berdasarkan kasus kenakalan remaja diatas, maka diperlukan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan menurunnya moral dan karakter yang baik pada diri generasi penerus bangsa yang ditandai dengan meningkatnya kasus kenakalan remaja dan ditambah dengan tantangan zaman yang terus berjalan menuju masa depan yang semakin kompleks, oleh sebab itu pemerintah Indonesia harus membuat strategi dan kebijakan atau program yang mampu mengintegrasikan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional para generasi muda, salah satunya yaitu melalui bidang pendidikan. Melihat kondisi generasi penerus bangsa seperti saat ini, bidang pendidikan menjadi harapan dalam membimbing dan memperbaiki karakter serta moral generasi muda/siswa sekolah. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

³ Asep Saepurokhan dan Yena Sumayana, Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Melalui Penanaman Nilai-Nilai Karya Sastra, Jakarta, Working Paper, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018, hlm. 2

Dalam mewujudkan isi UU Sisdiknas tersebut pemerintah melalui instansi pendidikan harus dapat membuat program-program kegiatan pembelajaran di sekolah yang bertujuan untuk membentuk karakter dan moral yang baik kepada generasi muda atau siswa sekolah, salah satu inovasinya yaitu melalui Sekolah Berbasis Pesantren (SBP).

Menurut Kemendikbud RI yang dikutip oleh Nurochim menjelaskan bahwa, SBP secara nasional mulai dideklarasikan di Indonesia pada Tahun 2008 silam yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, yang bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, *Center for Research and Development in Education* (CERDEV) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jumlah anggota SBP pada mulanya hanya 25 SBP dan pada akhir Tahun 2015 tercatat berkembang menjadi 302 SBP⁴. Akan tetapi untuk program SBP ini masih banyak pemerintah daerah yang belum melaksanakannya dan kasus kenakalan remaja masih banyak terjadi di berbagai daerah salah satunya di provinsi Sumatera Barat.

Berikut beberapa kasus kenakalan remaja yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat diantaranya yaitu Pertama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat mencatat telah terjadi 460 kasus narkoba yang menjerat sebanyak 593 tersangka pengguna dari kalangan pelajar dan mahasiswa sepanjang Tahun 2017⁵. Kedua, menurut Dinas Kesehatan Kab. Solok jumlah kasus

⁴ Nurochim, Sekolah Berbasis Pesantren Sebagai Salah Satu Model Pendidikan slam Dalam Konsepsi Perubahan Sosial, *Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 1, Mei 2016, hlm 80

⁵<https://www.covesia.com/archipelago/baca/40538/bnnp-pengguna-narkoba-di-sumbar-meningkat-Tahun-2017> diakses tanggal 12 September 2020, Jam 09.00

HIV/AIDS dari 2011 hingga 2017 mencapai 65 kasus, 28 orang meninggal dunia, jadi jumlah penderita saat ini 37 orang, kasus ini disebabkan oleh tingginya pergaulan bebas di Kab. Solok⁶. Dan terakhir kejadian yang menjadi perhatian yaitu pada saat pengumuman hasil UN hampir setiap Tahun budaya coret-coretan menghiasi euphoria kelulusan UN, seperti yang terjadi di Kota Padang ribuan pelajar SMP berkonvoi dengan sepeda motor merayakan kelulusannya sambil melakukan coret-coretan dan pesta di sepanjang jalan⁷.

Akibat dari kasus-kasus yang terjadi, maka salah satu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk menanggulangi permasalahan tersebut yaitu pada Tahun 2017 pemerintah Kabupaten Solok juga ikut menerapkan Sekolah Berbasis Pesantren (SBP) di Kabupaten Solok yang diberi nama "Program Sekolah Umum Berbasis Pesantren". Hal ini dijelaskan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Solok yang menyampaikan bahwa:

“Program SUBP ini merupakan program pemikiran dari kepala daerah, yang mana Bupati Kabupaten Solok melihat banyak anak-anak sekolah pada saat sekarang ini mulai berkurang akhlak dan moralnya akibat dari teknologi atau globalisasi tersebut contohnya banyak anak-anak yang bolos sekolah karena main warnet untuk bermain game online, kemudian banyak anak-anak sekolah yang sudah bepenampilan dan bersifat kebarat-baratan, dan banyak kasus penyimpangan remaja terutama di kalangan siswa sekolah. Sehingga dibuat program SUBP ini untuk meminimalisir permasalahan tersebut....” (Wawancara dengan Ibu Dr. Nila Kesumawati S.Ag, M.Pd, Kabid SMP Disdikpora Kab. Solok pada 21 Oktober 2020).

⁶<https://www.google.com/amp/s/sumbar.antaraneews.com/amp/berita/219211/pengidap-hivaidis-di-solok-diminta-terbuka-memeriksakan-diri>, diakses tanggal 12 september 2020, Jam 09.00

⁷<https://hariansingalang.co.id/coret-seragam-dan-konvoi-motor-siswa-smp-di-padang-rayakan-lulus-un/amp/>. diakses hari Jum'at tanggal 12 September 2020, Jam 09.00 Wib

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa tujuan atau alasan dibentuknya program SUBP di Kabupaten Solok yaitu untuk memperbaiki akhlak dan moral generasi muda terutama siswa sekolah. Dan juga program SUBP ini, terbentuk karena awalnya terinspirasi dari program SBP yang dilaksanakan oleh salah satu SMP negeri di Kabupaten Solok yaitu SMP Negeri 6 Gunung Talang yang telah melaksanakan program SBP sejak Tahun 2009 secara mandiri. Serta program SBP yang diterapkan SMP Negeri 6 Gunung Talang tersebut, sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yaitu "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat madani dalam nuansa adat basandi syara', syara' basandi kitabullah". Dan juga visi Disdikpora Kabupaten Solok yaitu "Terwujudnya insan pendidikan pemuda dan olahraga yang cerdas, terampil, kompetitif dan berkarakter dalam nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah".

Program SUBP dalam Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Umum Berbasis Pesantren pada Satuan Pendidikan dasar di Kabupaten Solok merupakan kebijakan atau program sekolah umum yang terencana memfasilitasi peserta didik mengenal, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai islam melalui beberapa mata pelajaran dan terintegrasi dalam proses pembelajaran. Dalam aturan tersebut program SUBP ini memiliki tujuan yang terbagi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum sekolah umum berbasis pesantren pada satuan pendidikan dasar adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Solok yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat yang madani di bidang pendidikan serta mewujudkan peserta didik yang memiliki pemahaman nilai-nilai islam yang terlihat dari aspek

kognitif, psikomotorik, afektif. Sedangkan tujuan khusus sekolah umum berbasis pesantren pada satuan pendidikan dasar adalah:

- a. Membentuk kepribadian siswa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. Membentuk kepribadian siswa yang berbudi pekerti luhur, mantap, mandiri dan bertanggung jawab;
- c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keagamaan;
- d. Menciptakan siswa yang sehat jasmani dan rohani;
- e. Merealisasikan nilai-nilai agama islam dengan prinsip adat basandi syara 'dan syara' basandi kitabullah;
- f. Menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang menyenangkan, bersih, indah dan Islami dengan sistem PAIKEMI (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efisien, Menyenangkan dan Islami);
- g. Siswa yang mampu dalam hal: 1) Baca Tulis Al Quran, Fiqh Ibadah, dan Hafalan Al Quran pada Tingkat Sekolah Dasar; 2) Baca Tulis Al Quran, Fiqh Ibadah, Hafalan Al Quran, Bahasa Arab dan Terjemah Tafsir Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama.
- h. Memiliki sikap keteladanan, saleh, disiplin, sederhana, dan toleransi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan program SUBP ini merupakan kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Solok yang mengintegrasikan atau menggabungkan kurikulum pendidikan formal dan kurikulum pendidikan pesantren yang bertujuan untuk menanamkan, membentuk dan meningkatkan nilai-nilai religius pada kepribadian siswa di sekolah umum.

Pada Sumatera Barat yaitu pemerintah Kabupaten Solok, menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang melaksanakan program SUBP dan dianggarkan oleh pemerintah. Sedangkan di daerah lain mengenai program SUBP hanya baru dilaksanakan oleh sekolah-sekolah secara mandiri dan belum ada regulasi serta anggaran dana yang diberikan pemerintah contohnya SMK Plus Berbasis Pesantren BNM Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, SMK BNM Berbasis Pesantren Kabupaten Agam, dan SMP Negeri 9 Solok Selatan⁸.

Program SUBP di Kabupaten Solok telah dilaksanakan oleh Disdikpora Kabupaten Solok selama kurang lebih 3 Tahun. Pada mulanya program SUBP disosialisasikan pertama kali pada Tahun 2017 oleh Disdikpora dan Bupati Kabupaten Solok dengan nama program "SMP dan/atau sederajat Bernuansa Islami" kepada sekolah menengah pertama (SMP) saja karena berdasarkan data kasus kenakalan remaja diatas, pada umumnya kasus-kasus tersebut dilakukan oleh siswa sekolah pada tingkat SMP dan SMA; kemudian berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk jenjang pendidikan SMA termasuk dalam wewenang pemerintah provinsi sehingga, pemerintah Kabupaten Solok pada mulanya hanya bisa menerapkan program SUBP pada tingkat SMP saja. SMP yang dipilih sebagai *piloting program* SUBP yaitu ada 17 dari 71 SMP negeri dan swasta, hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid SMP Disdikpora Kabupaten Solok yang menyampaikan bahwa:

“Pada awal dilaksanakan program SUBP yaitu Tahun 2017, Program SUBP mulanya dilaksanakan dan dianggarkan hanya pada

⁸

https://www.google.com/search?safe=strict&client=ms-android-oppo&sxsrf=ALeKk03rCGce31_QuCJeaHENAxQ3Ut1AxA%3A1614914868426&ei=NKVBYK nDGc3arQG_qrTgDw&q=sekolah+berbasis+pesantren+di+sumatera+barat&oq=sekolah+berbasis+pesantren+dk+sumatera+barat&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAEYADIHCCMQ sAIQJzIFCAAQzQJQAFgAYPrQXWgAcAB4AIABpgSIAaYEkGEDNS0xmAEAwAEB&sclient=mobile-gws-wiz-serp diakses tanggal 5 Maret 2021, Jam 09.00

sekolah menengah pertama saja yaitu sebanyak 17 SMP di Kabupaten Solok yang masih sedikit jumlah siswanya, tujuan dipilihnya 17 sekolah tersebut untuk meningkatkan jumlah siswa di sekolah-sekolah tersebut dan sekaligus menjadi *piloting program* SUBP. Kemudian pada Tahun 2018, program SUBP mulai dilaksanakan pada tingkat sekolah dasar yang menjadi rayon dari 17 SMP tersebut yaitu sebanyak 85 SD di Kabupaten Solok."(Wawancara dengan Ibuk Dr. Nila Kesumawati S.Ag, M.Pd, Kabid SMP Disdikpora Kab. Solok pada 21 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan program SUBP di Kabupaten Solok awalnya di Tahun 2017 hanya dilakukan pada sekolah tingkat SMP yang jumlah siswanya masih sedikit karena bertujuan untuk meningkatkan jumlah siswa di sekolah-sekolah tersebut. Kemudian pada Tahun 2018 program SUBP mulai dilaksanakan dan dianggarkan untuk tingkatan SD yang menjadi rayon dari 17 SMP piloting SUBP tersebut. Berikut daftar SMP yang telah dianggarkan sebagai *piloting program* SUBP beserta jumlah muridnya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar SMP *Piloting Program*
dan Jumlah Siswa Pada Bulan Juli Tahun 2020

NO	Nama Sekolah	Jumlah Siswa
1	SMPN 2 Hiliran Gumanti	114
2	SMPN 2 Gunung Talang	809
3	SMPN 5 Lembang Jaya	184
4	SMPN 1 Tigo Lurah	171
5	SMPN 2 Pantai Cermin	137
6	SMPN 6 Kubung	46
7	SMPN 6 Gunung Talang	299
8	SMPN 3 Bukit Sundi	135
9	SMPN 2 Junjung Sirih	82
10	SMPN 3 Payung Sekaki	86
11	SMPN 1 Kubung	342
12	SMPN 3 X Koto diatas	92
13	SMPN 5 X Koto Singkarak	53
14	SMPN 1 IX Koto Sungai Lasi	101
15	SMPN 3 Kubung	75

16	SMPN 1 Danau Kembar	225
17	SMPN 4 Lembah Gumanti	192
Total		3.143

Sumber: Disdikpora Kabupaten Solok, 2021

Kemudian, pelaksanaan program SUBP pada awalnya diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan/atau Sederajat Bernuansa Islami di Kabupaten Solok, yang kemudian dilakukan perubahan dikarenakan menurut pemerintah Kabupaten Solok untuk tingkat SD juga memerlukan penyelenggaraan SUBP sehingga, dilakukan perubahan menjadi Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Umum Berbasis Pesantren pada Satuan Pendidikan dasar di Kabupaten Solok. Perubahan peraturan tersebut mengakibatkan perubahan nama program SMP dan/ sederajat Bernuansa Islami menjadi program Sekolah Umum Berbasis Pesantren. Dalam peraturan SUBP tersebut mengatur mengenai pelaksanaan program SUBP di Kabupaten Solok baik itu prosedur pelaksanaan, pengawasan atau monitoring, evaluasi, pihak yang menjadi pelaksana program dan lain-lainnya.

Pelaksanaan program SUBP terdapat kegiatan-kegiatan yang menjadi inti dari program SUBP, kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan di bidang agama dan pembentukan moral siswa. Kemudian untuk kegiatan SUBP di setiap SMP *piloting program* semuanya sama dan diatur berdasarkan ketetapan oleh pemerintah daerah melalui Disdikpora Kabupaten Solok, hal ini dijelaskan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid SMP Disdikpora Kabupaten Solok yang menyatakan:

“Kegiatan-kegiatan program SUBP yang dilaksanakan oleh setiap SMP *piloting SUBP* dibahas dan diputuskan berdasarkan hasil

keepakatan MGMP SUBP yang dihadiri guru-guru SUBP setiap sekolah dan dibimbing oleh pihak dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana disana membahas RPP, Prota dan Promes SUBP sehingga kegiatannya sama dan teratur."(Wawancara dengan Ibuk Dr. Nila Kesumawati S.Ag, M.Pd, Kabid SMP Disdikpora Kab. Solok pada 21 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kegiatan SUBP di setiap SMP *piloting program* di Kabupaten Solok semuanya sama, hal ini telah diatur berdasarkan hasil kesepakatan dalam MGMP SUBP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran SUBP) yang diselenggarakan dan dibimbing oleh pihak Disdikpora Kabupaten Solok sesuai dengan peraturan penyelenggaraan SUBP yang berlaku yaitu Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan sekolah umum berbasis pesantren pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Solok dalam pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Daftar kegiatan SUBP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut beserta data pelaksanaan dari 15 SMP *piloting program* yang didapatkan:

Tabel 1.2
Daftar Kegiatan SUBP dan Pelaksanaan Pada Setiap
SMP Piloting Program Bulan September 2019

No	Kegiatan SUBP	Sekolah																	Total	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Mela ksana kan	Tidak Melaks anakan
Program Utama / Pembelajaran																				
1	Pendidikan Al-Qur'an	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15	-
2	Fiqih	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15	-
3	Tafsir	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15	-
4	Bahasa Arab	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15	-
5	Tahfiz	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15	-
Program Pemanapan Ibadah dan Pembinaan Akhlak																				
6	3S (Salam,Senyum,Sapa)	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15	-
7	Sholat sunat dhuha	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15	-
8	Sholat zuhur berjama'ah	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15	-
9	Puasa sunat	X	√	√	-	-	√	√	X	√	√	√	√	√	-	-	√	√	11	4
10	Berberis disamping kelas	X	√	√	√	-	√	√	X	-	√	√	√	-	√	√	√	√	12	3
Kegiatan Pra PBM																				
11	Tadarus	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15	-
12	Asmaul husna	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15	-
13	Zikir	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15	-
14	Selawat	X	√	√	√	√	√	√	X	-	√	√	√	√	√	-	√	√	13	2
15	Hafalan	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	-	-	√	13	2
16	Senandung Al-Qur'an	X	√	√	-	√	√	√	X	-	√	√	-	√	√	√	√	-	11	4
17	Tabligh Jum'at	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	-	√	√	√	√	14	1
18	Infaq/Sedekah	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15	-
19	Gerakan Literasi Sekolah	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-	√	√	-	√	√	13	2

Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan																				
20	Pondok Al-Qur'an	X	√	√	-	-	√	√	X	√	√	√	√	-	-	-	-	√	9	6
21	Bimbingan Kaligrafi	X	√	√	√	-	-	-	X	-	-	√	√	√	-	-	-	-	6	9
22	Forum Annisa	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	-	√	√	√	√	√	√	14	1
23	Prog. Babaliek kasurau	X	√	√	√	-	-	√	X	√	√	-	√	-	-	-	-	-	7	8
24	Prog. Busana muslimah	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	-	√	-	√	√	√	-	12	3
25	Bimbingan Nasyid	X	√	√	√	-	-	√	X	-	-	-	-	√	-	-	-	-	5	10
26	Bimbingan Qasidah	X	√	√	√	-	-	√	X	-	-	√	√	-	-	-	√	√	8	7
27	Bimbingan Khatib Jumat	X	√	√	√	-	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	-	√	13	2
28	Forum Arrijal	X	√	√	√	-	-	-	X	√	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11
29	Bimbingan Peny.Jenazah	X	√	√	-	-	√	√	X	√	√	-	√	√	√	√	-	√	12	3
Program Pembinaan Keagamaan																				
30	Tadabur Alam	X	√	√	√	-	√	√	X	-	√	-	√	-	√	-	-	-	8	7
31	Muhasabah	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15	-
32	Peringatan hari besar islam (PHBI)	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15	-
33	Praktek dakwah ke Msj/Msl	X	√	√	√	-	√	√	X	√	√	-	√	√	√	-	-	√	11	4

Sumber: Laporan Bulanan SUBP Sekolah di Disdikpora Kabupaten Solok, 2021

Keterangan

Nomor penentuan sekolah pada tabel sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. SMPN 2 Hiliran Gumanti | 10. SMPN 3 Payung Sekaki |
| 2. SMPN 2 Gunung Talang | 11. SMPN 1 Kubung |
| 3. SMPN 5 Lembang Jaya | 12. SMPN 3 X Koto diatas |
| 4. SMPN 1 Tigo Lurah | 13. SMPN 5 X Koto Singkarak |
| 5. SMPN 2 Pantai Cermin | 14. SMPN 1 IX Koto Sungai Lasi |
| 6. SMPN 6 Kubung | 15. SMPN 3 Kubung |
| 7. SMPN 6 Gunung Talang | 16. SMPN 1 Danau Kembar |
| 8. SMPN 3 Bukit Sundi | 17. SMPN 4 Lembah Gumanti |
| 9. SMPN 2 Junjung Sirih | |

Tanda

- √ = Melaksanakan
 - = Tidak Melaksanakan
 X = Tidak ada data

Berdasarkan observasi dan data yang telah dikumpulkan pelaksanaan program SUBP pada SMP *piloting program* di Kabupaten Solok, Peneliti menemukan beberapa fenomena terkait kondisi dari program SUBP yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 3 Tahun pada SMP *piloting program* yaitu: Pertama dari segi fasilitas, fasilitas pendukung pelaksanaan program SUBP yang harus dilengkapi oleh SMP *piloting program* yang sesuai dengan ketentuan dari pihak Disdikpora Kabupaten Solok dinilai masih kurang memadai pada beberapa SMP *piloting program*, yang dapat dilihat pada tabel berikut yang berisikan data ketersediaan fasilitas SUBP dari 15 SMP *piloting program* yang didapatkan datanya yaitu:

Tabel 1.3
Daftar Ketersediaan Fasilitas SUBP
Pada SMP *Piloting Program* Bulan September 2019

No	Fasilitas	Jumlah sekolah	
		Ada	Tidak Ada
1	Musholla	15	-
2	Tempat berwuduk siswa	15	-
3	Air bersih	15	-
4	Tikar sholat	15	-
5	Pembatas syaf	5	10
6	Almari penyimpanan	7	8
7	Al-Qur'an	15	-
8	Buku-buku islam	14	1
9	Rebana Qasidah	9	6
10	Pakaian Qasidah	4	11
11	Pakaian Nasyid	3	12
12	Alat-alat Peraga	6	9
13	Pengeras suara	15	-

Sumber: Laporan SUBP Sekolah di Disdikpora Kabupaten Solok, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dinilai bahwa fasilitas pendukung program SUBP masih belum memadai dikarenakan untuk musholla secara keseluruhan setiap SMP *piloting program* telah memilikinya beserta alat perlengkapan yang cukup memadai. Namun ada beberapa perlengkapan

pembelajaran yang masih banyak SMP *piloting program* seperti rebana qasidah dan pakainnya serta alat-alat peraga untuk membantu proses pembelajaran SUBP seperti boneka untuk praktek sholat jenazah dan lain-lainya dinilai lebih dari setengah SMP *piloting program* tidak memilikinya.

Kedua, dari segi anggaran dana untuk pelaksanaan program SUBP di setiap SMP *piloting program* dinilai masih kurang mencukupi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Kabid SMP Disdikpora Kabupaten Solok yang menyampaikan bahwa:

"Sumber anggaran pelaksanaan SUBP didanai oleh pemerintah daerah Kabupaten Solok, pada awalnya di Tahun 2017-2019 anggaran program SUBP terdiri atas gaji guru, ATK(alat tulis kantor), gaji pengelola, gaji pengawas, pengadaan buku, rapor dan lain-lain untuk 17 SMP *piloting program*. Tetapi pada Tahun 2020, anggaran dikurangi untuk tingkat SMP *piloting program* karena penyerapan pendapatan daerah kita masih sedikit, kemudian terjadi penambahan sekolah SUBP untuk tingkatan SD dan kegiatan di Disdikpora lumayan banyak sehingga 2020 saat ini anggaran SUBP tersebut hanya untuk gaji guru-guru SUBP saja".(Wawancara dengan Ibuk Dr. Nila Kesumawati S.Ag, M.Pd, Kabid SMP Disdikpora Kab. Solok pada 21 Oktober 2020)

Hal ini juga diperkuat dengan data jumlah anggaran dana SUBP untuk tingkat SMP dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dana (DPPA) SUBP dari Tahun 2017-2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Anggaran Dana Dalam DPPA SUBP Tahun 2017-2020
Untuk Tingkat SMP

NO	Tahun	Jumlah Anggaran
1	2017	Rp. 1.299.983.000
2	2018	Rp. 1.811.550.000
3	2019	Rp. 1.913.929.000
4	2020	Rp. 1.023.000.000

Sumber: Disdikpora Kabupaten Solok, 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel jumlah anggaran dana SUBP untuk tingkat SMP diatas, dinilai anggaran dana program SUBP masih belum mencukupi dikarenakan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk tingkat SMP *piloting program* dinilai masih belum memadai yang dapat dilihat pada tabel 1.3, meskipun mengalami kenaikan anggaran dana setiap Tahunnya tetapi, kenaikan anggaran tersebut ternyata difokuskan pada peningkatan gaji guru SUBP.

Ketiga, dari segi pelaksanaan kegiatan dari setiap SMP *piloting program* secara keseluruhan telah melaksanakan kegiatan program SUBP yang dapat dilihat pada tabel 1.2. Berdasarkan tabel tersebut ada 15 SMP *piloting program* yang didapatkan data pelaksanaan kegiatannya. Pertama terlihat pelaksanaan program utama SUBP (pembelajaran SUBP) secara keseluruhan telah dilaksanakan oleh setiap SMP *piloting program*. Tetapi untuk program pemantapan ibadah dan pembinaan akhlak, kegiatan pra PBM, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dan program pembinaan keagamaan belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh setiap SMP *piloting program* terutama untuk kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Penyebabnya hal ini dijelaskan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid SMP Disdikpora Kabupaten Solok yang menyatakan:

“.....Penyebab dari permasalahan program SUBP pada saat ini, dari anggaran yang belum mencukupi dan kemampuan sekolah seperti pemungutan biaya dari siswa yaitu uang komite dan uang SPP sudah ditiadakan sehingga sekolah tidak ada lagi pendanaan tambahan untuk pemenuhan kegiatan di sekolah.”(Wawancara dengan Ibuk Dr. Nila Kesumawati S.Ag, M.Pd, Kabid SMP Disdikpora Kab. Solok pada 21 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sumber anggaran dana dari pemerintah masih belum mencukupi. Hal ini disebabkan, oleh kemampuan pendanaan masing-masing SMP di Kabupaten Solok (termasuk SMP *piloting SUBP*) telah terbatas sehingga, sarana dan prasarana pendukung tidak bisa terpenuhi dan kegiatan tidak bisa dilaksanakan.

Kemudian, berdasarkan observasi pada masa pandemik Covid-19 sekarang mengakibatkan seluruh sekolah ditutup untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran Covid-19 serta kegiatan pembelajaran siswa di sekolah dialihkan ke metode daring atau secara online menggunakan teknologi, sehingga siswa tetap bisa belajar dari rumah. Untuk pelaksanaan program SUBP di masa pandemik kepada siswa masing-masing SMP *piloting program* dinilai tidak optimal dan juga ada beberapa kegiatan program SUBP yang tidak bisa dilaksanakan selama masa pembelajaran daring seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pra PBM, dan program pembinaan keagamaan. Sedangkan untuk kegiatan program SUBP yang masih bisa dilaksanakan seperti program utama (pembelajaran) dinilai tidak bisa optimal. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan kegiatan program SUBP adalah kegiatan praktek dan membutuhkan interkasi secara langsung dengan siswa untuk proses pembelajarannya agar dapat lebih dipahami.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti evaluasi pelaksanaan program sekolah umum berbasis pesantren yang diberi judul "Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Umum Berbasis Pesantren pada SMP *piloting program* di Kabupaten Solok".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hasil evaluasi dari pelaksanaan program SUBP di SMP *piloting program* Kabupaten Solok?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil evaluasi dari pelaksanaan program SUBP di SMP *piloting program* Kabupaten Solok, sehingga dapat diketahui tingkat pencapaian keberhasilan tujuan program tersebut, serta bisa dijadikan sebagai gambaran dan analisis pengambilan keputusan, apakah program SUBP sudah dapat meningkatkan dan merubah karakter dan moral siswa ke arah lebih baik atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan kajian ilmu Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, acuan, serta sumbangan pemikiran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.